

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK),
DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA
MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PAPUA DAN PAPUA
BARAT TAHUN 2016**

RINGKASAN SKRIPSI



EEN BEANA PRATIWI

1116 28749

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN
KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2019/2020**

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK),
DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA
MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PAPUA DAN PAPUA
BARAT TAHUN 2016**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

EEN BEANA PRATIWI

No Induk Mahasiswa: 1116 28749

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 20 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing


Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

Penguji


Endang Setyowati, Dra, M.Si

Yogyakarta, 20 Februari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua


Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2016

EEN BEANA PRATIWI

1116 28749

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN
YOGYAKARTA

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten dan kota di Papua dan Papua Barat tahun 2016 dengan jumlah kabupaten dan kota yaitu 42.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat tahun 2016. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji Z, dan R^2 .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal.

Abstract: The purpose of this study is to determine whether there an influence of Locally-Generated Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Revenue Sharing Funds on the Allocation of Capital Expenditures in Regency / City Governments in Papua and west Papua. all districts and cities in Papua and West Papua in 2016 with a total of 42 used as sample in this research.

This study uses secondary data in the form of Realization Report of the District / City Government Budgets in Papua and West Papua in 2016. The prerequisite test for data analysis uses the normality test, multicollinearity test, and

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

heterokedasticity test. Hypothesis testing uses multiple linear regression analysis with t test, Z test, and R square.

The results showed that PAD with a negative direction, DAK and DBH had a positive effect on capital expenditure. Whereas DAU does not have a positive effect on capital expenditure. Simultaneously the PAD, DAU, DAK, and DBH variables affect capital expenditure.

Keywords: *Locally-Generated Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds and Capital Expenditures.*

PENDAHULUAN

Adanya otonomi daerah, pemerintahan yang awalnya menggunakan asas sentralisasi berubah menjadi asas desentralisasi. Menurut Siregar (2017, hal. 75) berdasarkan asas otonomi setiap daerah diberikan wewenang oleh pusat. Kondisi ini disebut desentralisasi. Agama, yustisi, hankam (pertahanan dan keamanan), fiskal nasional serta moneter, dan politik luar negeri merupakan urusan absolut yang hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, wewenang urusan absolut tersebut dapat dilimpahkan.

Oleh karena itu, daerah membutuhkan penyediaan sumber pendanaan dari APBD yang dapat dipakai dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rencana pengeluaran dan penerimaan dalam satuan uang yang ditaksir untuk periode yang akan datang dikenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disebut APBD serta diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 dengan siklus pada perencanaan, pemeriksaan dan pengawasan, pelaksanaan, serta penyusunan dalam penetapan perhitungannya (Halim dan Kusufi, 2012, hal. 23). Suatu anggaran daerah disebut APBD (Halim, 2001, hal. 16). APBD digunakan sebagai pedoman / pegangan / petunjuk untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin dekat hasil dengan tujuan maka akan semakin baik. Berikut struktur utama APBD menurut Siregar (2017, hal. 31):

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pendapatan daerah merupakan segala pemasukan rekening kas umum yang meningkatkan SAL (saldo anggaran lebih) untuk periode terkait serta pemerintah memiliki hak untuk tidak perlu membayar kembali. Pendapatan daerah tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Siregar, 2017, hal. 32).

Belanja Daerah diklasifikasikan kedalam belanja langsung dan tak langsung. Belanja subsidi, hibah, tak terduga, bunga, pegawai, bantuan sosial dan keuangan, serta bagi hasil merupakan klasifikasi dari belanja tak langsung. Sedangkan belanja modal, barang dan jasa, serta pegawai merupakan klasifikasi dari belanja langsung. Pada Pembiayaan Daerah memiliki dua kategori yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Siregar, 2017, hal. 31-32).

Dari seluruh pendapatan yang diperoleh setiap daerah, maka dialokasikanlah Belanja Modal untuk memenuhi kebutuhan berupa pelayanan yang dapat secara nyata dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat khususnya sarana dan prasarana atau infrastruktur. Output dari pengalokasian Belanja Modal ini berupa bangunan dan gedung, mesin dan peralatan, tanah, jaringan, dan berbentuk fisik lainnya yang dapat secara langsung selama lebih dari satu periode akuntansi dan berupa fasilitas publik kepada masyarakat maupun kelancaran tugas pemerintah daerah (Dewi, 2017). Dengan dilandasi uraian yang telah disebutkan, penulis menetapkan topik “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat Tahun 2016.”

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Belanja Modal

Menurut Nordiawan (2008, hal. 162) Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah dalam hal menciptakan kepemilikan pemerintah terhadap aktiva tetap tertentu. Bersumber pada PSAP No.02, aset tetap/aset lain dengan manfaat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melebihi satu periode akuntansi serta diperoleh melalui pengeluaran yang telah dianggarkan disebut Belanja Modal.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yakni seluruh pemasukan yang diterima oleh daerah serta diperoleh dari penghasilan ekonomi asli daerah (Halim dan Kusufi, 2012, hal. 101). Menurut Siregar (2017, hal. 32) dengan berlandaskan undang-undang, pemerintah daerah menerima hasil melalui sumber-sumber yang diperoleh dari dalam wilayah sendiri yang kemudian disebut dengan pendapatan asli daerah.

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah bagian dari dana perimbangan yang digunakan untuk meratakan keadaan keuangan antar daerah (Bastian dan Soepriyanto, 2003, hal. 84). Menurut Siregar (2017, hal. 87) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah serta dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang sumbernya dari APBN.

4. Dana Alokasi Khusus

PP No.55 tahun 2005 mengatur perihal daerah tertentu mendapatkan dana yang disebut dengan Dana Alokasi Khusus. Tujuannya yaitu pendanaan kegiatan khusus daerah selaras dengan prioritas nasional serta sumbernya melalui APBN yang jumlahnya ditetapkan setiap tahun dan petunjuknya ditetapkan paling lambat dua minggu setelah menteri keuangan menetapkan alokasi DAK tersebut. Dana perimbangan salah satunya mencakup DAK digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu (Bastian dan Soepriyanto, 2003, hal. 84).

5. Dana Bagi Hasil

Menurut Badrudin (2017, hal. 100), Dana Bagi Hasil merupakan dana yang diberikan kepada daerah melalui APBN dengan persentase tertentu untuk pelaksanaan desentralisasi. Dalam PP 55 tahun 2005, Dana Bagi Hasil adalah pengalokasian dengan persentase tertentu untuk daerah dari APBN dengan tujuan melaksanakan desentralisasi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut Juniawan dan Suryantini (2018) Pendapatan Asli Daerah memengaruhi Belanja Modal yang dikeluarkan dengan arah positif. Artinya, peningkatan PAD akan berbanding lurus dengan peningkatan Belanja Modal. Dengan demikian, maka harapan masyarakat dalam peningkatan pelayanan serta sarana dan prasarana maupun infrastruktur daerah dapat tercapai. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat tahun 2016.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Abid, Rahayu dan Aminah (2018) menghasilkan variabel DAU memengaruhi pengalokasian belanja modal dengan positif. Hal itu berarti bahwa terjadi keterkaitan antara transfer pemerintah pusat dengan pembangunan infrastruktur di daerah yang didanai melalui belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Ayem dan Pratama (2018) yang menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat tahun 2016.

Penelitian Wandira (2013) menyimpulkan bahwa DAK mempengaruhi Belanja Modal dengan koefisien positif. Dengan demikian, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat tahun 2016.

Menurut Wandira (2013), DBH memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap alokasi belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila terjadi peningkatan DBH sumber daya alam serta pajak di daerah maka tujuan dalam hal meminimalisir ketidakseimbangan vertikal antara pemerintah daerah dan pusat dapat terealisasi serta dapat meningkatkan belanja modal. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H4: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat tahun 2016.

Menurut Wandira (2013), DBH memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap alokasi belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila terjadi peningkatan DBH sumber daya alam serta pajak di daerah maka tujuan dalam hal meminimalisir ketidakseimbangan vertikal antara pemerintah daerah dan pusat dapat terealisasi serta dapat meningkatkan belanja modal. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan/atau Kota di Papua dan Papua Barat tahun 2016. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat yang meliputi 40 daerah Kabupaten dan 2 daerah Kota sehingga total sampel adalah 42 data.

Penjelasan terperinci mengenai variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui ukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima melalui sumber-sumber di dalam wilayah daerah itu sendiri dengan cara menggali, mengolah serta mengelola segala potensi yang ada. Dengan demikian, daerah mempunyai pendapatan asli masing-masing yang berbeda-beda di setiap daerah. PAD dari masing-masing daerah diukur dengan rumus:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain pendapatan daerah yang sah.}$$

Sumber: Kusumadewi (2013).

2. Dana Alokasi Umum (X_2)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dana Alokasi Umum adalah dana yang diperoleh daerah melalui transfer oleh pemerintah dari APBN untuk memenuhi pelaksanaan desentralisasi

serta dalam rangka mengurangi ketimpangan antar pemerintah daerah (horizontal). DAU diukur dengan rumus:

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

$$\text{Kebutuhan Fiskal} = \text{Total Belanja Rata-Rata (Indeks Jumlah Penduduk + Indeks Luas Wilayah + Indeks Kemahalan Konstruksi + Indeks Pembangunan Manusia + Indeks dari PDRB per kapita)}$$

$$\text{Kapasitas Fiskal} = \text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Dana Bagi Hasil Pajak} + \text{Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam}$$

$$\text{Alokasi Dasar} = \text{Jumlah Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah}$$

Sumber: Siregar (2017).

3. Dana Alokasi Khusus (X_3)

Besaran Dana Alokasi Khusus untuk kabupaten/kota dihitung dengan rumus:

$$\text{Bobot Dana Alokasi Khusus} = \text{Bobot Daerah} + \text{Bobot Teknis}$$

$$\text{Bobot Daerah} = \text{Indeks Fiskal dan Wilayah} \times \text{Indeks Kemahalan Konstruksi}$$

$$\text{Bobot Teknis} = \text{Indeks Teknis} \times \text{Indeks Kemahalan Konstruksi}$$

Sumber: Roshida (2013).

4. Dana Bagi Hasil (X_4)

Dana perimbangan salah satunya yakni Dana Bagi Hasil yang teralokasi untuk daerah dengan tujuan agar mengurangi ketidakseimbangan vertikal antara pemerintah di daerah dengan pemerintah yang ada di pusat serta untuk memenuhi terselenggaranya desentralisasi. Rumus DBH sebagai berikut:

$$\text{Dana Bagi Hasil} = \text{Dana Bagi Hasil Pajak} + \text{Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam}$$

Sumber: Rachmawati (2016).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Belanja Modal (Y)

Belanja Modal adalah arus kas pengeluaran pemerintah dalam hal pembelian aset tetap atau aset lainnya guna memenuhi tercapainya kepentingan umum yang periodenya melebihi dari dua belas bulan (satu tahun). Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut tidak hanya digunakan untuk menambah aset tetap saja, tetapi juga dipergunakan untuk membiayai pengeluaran biaya pemeliharaan guna mempertahankan masa manfaat aset tersebut serta menambah kualitas dan kapasitas aset. Indikator dalam mengukur Belanja Modal adalah:

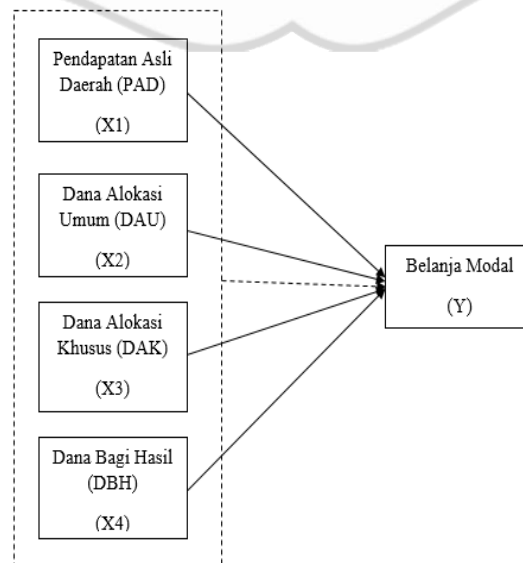
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Modal Gedung dan Bangunan + Belanja Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

Sumber: Roshida (2013).

Alat analisis yang dipergunakan terkait pengujian H_1 sampai dengan H_5 menggunakan analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini α ditetapkan sebesar 5%. Model penelitian dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$BM = f(PAD, DAU, DAK, DBH)$$

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + e$$



Gambar 3. 1 Model Penelitian

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Deskripsi data yang disajikan mencakup nilai rerata, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif yang telah diolah menggunakan bantuan Microsoft Excel 2016:

Tabel 4. 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Atas Pengolahan Data PAD, DAU, DAK, DBH, Dan Belanja Modal Pada Tahun 2016

	PAD	DAU	DAK	DBH	Belanja Modal
Mean	45.372.932.561	633.506.844.050	192.495.997.135	103.261.270.636	346.529.857.160
Standard Deviation	55.347.812.865	163.701.599.165	61.272.246.099	193.739.074.534	142.253.806.238
Minimum	6.504.731.093	348.712.841.000	89.316.392.294	36.241.360.803	165.105.499.034
Maximum	305.372.673.108	1.232.993.695.000	355.344.040.864	1.188.544.720.069	958.558.027.875
Count	42	42	42	42	42

Sumber: Data diolah.

Uji Normalitas

Model regresi yang baik apabila seluruh variabel berdistribusi normal (Subiyakto, 2001, hal. 243). Data yang telah berdistribusi normal berarti data tersebut memiliki sebaran yang merata. Oleh karena itu, dapat mewakili populasinya. Berikut disajikan hasil uji normalitas:

Tabel 4. 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov test	
N	42
Kolmogorov-Smirnov Z	0,699
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,712

Sumber: Data diolah.

Meninjau tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z = 0,699 dan nilai Sign. = 0,712. Nilai Sign. = 0,712 tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi (α) yang digunakan = 0,05. Hasil tersebut menyimpulkan data mengandung pendistribusian normal.

Uji Multikolinearitas

Dalam analisis regresi berganda, apabila tingkat korelasi antarvariabel independen meningkat maka koefisien regresi menjadi kurang reliabel. Kondisi demikian disebut dengan multikolinearitas (Boedijoewono, 2012, hal. 308). Model regresi yang baik yaitu apabila tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keputusan
	Tolerance	VIF	
PAD	0,408	2,454	Tidak terjadi multikolinearitas
DAU	0,716	1,397	Tidak terjadi multikolinearitas
DAK	0,800	1,250	Tidak terjadi multikolinearitas
DBH	0,411	2,433	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah.

Tabel diatas memperlihatkan hasil seluruh tingkat Tolerance melebihi 0,10 dan seluruh nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) menunjukkan kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari analisis ini yaitu mengamati apakah ada varians yang berbeda antar residual (Putra, 2017). Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan uji Glejser (*Glejser Test*).

Tabel 4. 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keputusan
PAD	0,295	Tidak terjadi heteroskedastisitas
DAU	0,928	Tidak terjadi heteroskedastisitas
DAK	0,020	Terjadi heteroskedastisitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DBH	0,068	Tidak terjadi heteroskedastisitas
-----	-------	-----------------------------------

Sumber: Data diolah.

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.5 memperlihatkan tingkat probabilitas signifikansi PAD, DAU, dan DBH lebih besar dari nilai α 5%. Sedangkan, pada variabel DAK menunjukkan bahwa tingkat probabilitas signifikansinya kurang dari 5%. Hal itu berarti bahwa terdapat persoalan heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Untuk memperbaiki adanya indikasi heteroskedastisitas tersebut, maka dilakukan transformasi logaritma natural (ln) agar setiap variabel tidak menyimpang dari uji asumsi klasik. Hasil uji heteroskedastisitas setelah transformasi logaritma natural disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas setelah ln

Variabel	Sig.	Keputusan
lnPAD	0,900	Tidak terjadi heteroskedastisitas
lnDAU	0,267	Tidak terjadi heteroskedastisitas
lnDAK	0,210	Tidak terjadi heteroskedastisitas
lnDBH	0,575	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah.

Tabel 4.6 menyatakan tingkat probabilitas lnPAD $0,900 > 5\%$, lnDAU $0,267 > 5\%$, lnDAK $0,210 > 5\%$, dan lnDBH $0,575 > 5\%$. Hasil tersebut, menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Simultan (F)

Uji F bertujuan menguji pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan (simultan). Jika nilai Sig menunjukkan angka yang lebih kecil dari 5%, maka variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara bersamaan. Hasil uji F disajikan pada tabel dibawah:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4. 6
Hasil Uji Simultan setelah ln

ANOVA			
	df	F	Sig.
Regresi	4	14,888	0,000
Residual	37		
Total	41		

Sumber: Data diolah.

Hasil dari Tabel 4.7 memperlihatkan hasil signifikansi = $0,000 < 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti secara simultan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan (bersama-sama).

Perolehan pengujian ini menjelaskan sumber-sumber pemasukan daerah mempengaruhi dengan kuat besarnya Belanja Modal. Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Wandira (2013) memperoleh simpulan yang sesuai dengan hipotesis pengamatan ini yakni PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan mempengaruhi Belanja Modal.

Uji Parsial (Z)

Tujuan dari uji Z ini yakni untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil uji t disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 7
Hasil Uji Parsial setelah ln

Model	Koefisien Regresi	t	Sig.	Keputusan
(Constant)	2,851	0,684		
lnPAD	-0,128	-2,655	0,012	H ₁ Tidak didukung
lnDAU	0,241	1,491	0,144	H ₂ Tidak didukung
lnDAK	0,476	4,136	0,000	H ₃ Didukung
lnDBH	0,316	4,787	0,000	H ₄ Didukung

Sumber: Data diolah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Merujuk tabel 4.8 susunan persamaan regresi berganda yaitu:

$$\ln BM = 2,851 - 0,128 \ln PAD + 0,241 \ln DAU + 0,476 \ln DAK + 0,316 \ln DBH + e$$

Berikut interpretasi model regresi tersebut:

1. Konstanta bernilai 2,851 berarti ketika seluruh variabel bernilai 0 (nol) maka Belanja Modal akan sebesar $\text{Exp}(2,851) = 17,305$.
2. Tanda koefisien $\ln PAD$ memperlihatkan pengaruh negatif untuk Belanja Modal. Dengan demikian, semakin bertambah $\ln PAD$ maka $\ln BM$ akan semakin rendah. Variabel $\ln PAD$ berpengaruh terhadap $\ln BM$ dengan nilai $-0,128$, artinya peningkatan 1% pada PAD akan menurunkan Belanja Modal 0,128%.
3. Tanda koefisien $\ln DAU$ menerangkan hubungan searah atau pengaruh positif pada Belanja Modal. Dengan demikian, semakin bertambah $\ln DAU$ maka $\ln BM$ akan semakin tinggi. $\ln DAU$ berpengaruh terhadap $\ln BM$ dengan nilai koefisien sebesar 0,241 artinya peningkatan DAU sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,241%.
4. Tanda koefisien $\ln DAK$ memperlihatkan pengaruh positif untuk Belanja Modal. Dengan demikian, semakin bertambah $\ln DAK$ maka $\ln BM$ akan semakin tinggi. $\ln DAK$ bernilai 0,476 artinya peningkatan 1% pada DAK akan menaikkan Belanja Modal sebanyak 0,476%.
5. Tanda koefisien $\ln DBH$ menandakan terjadinya pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, bertambahnya $\ln DBH$ juga akan diikuti oleh $\ln BM$. $\ln DBH$ berpengaruh terhadap $\ln BM$ dengan nilai koefisien sebesar 0,316 artinya peningkatan DBH sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,316%.

Dari Tabel 4.8 didapatkan nilai Z-hitung yaitu $-2,655$. Signifikansi H_1 sejumlah $0,012 < 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Hal tersebut menandakan PAD berpengaruh namun dengan arah negatif. Dengan demikian, PAD berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal yang berarti bahwa H_1 tidak didukung. Artinya, semakin tinggi PAD akan berbanding terbalik dengan Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah, atau Belanja Modal akan menurun apabila PAD ditingkatkan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Oleh karena itu, daerah yang memperoleh PAD yang besar akan cenderung mengakibatkan rendahnya Belanja Modal. Kondisi tersebut diakibatkan oleh pengalokasian PAD lebih ditekankan dalam hal pemenuhan kegiatan mendesak atau yang tidak dapat ditunda berupa belanja pegawai

Nilai Z-hitung untuk H_2 diperoleh angka 1,491. Signifikansi sebesar 0,144 > 5% yang artinya bahwa H_2 tidak didukung. Hal tersebut berarti DAU tidak berpengaruh positif pada Belanja Modal. Walaupun DAU yang diperoleh cukup tinggi, namun pemerintah juga perlu memenuhi kebutuhan daerah yang lain seperti belanja rutin daerah yang juga tinggi. Oleh sebab itu, alokasi DAU untuk Belanja Modal belum bisa terpenuhi secara maksimal.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh pada belanja modal dengan arah positif. Hal itu dinyatakan dengan hasil Z-hitung sebesar 4,136 serta nilai signifikansi H_3 sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut menunjukkan nilai kurang dari 5% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian H_3 didukung, yang artinya DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penggunaan DAK diatur oleh undang-undang dan digunakan untuk mendanai bidang atau kegiatan yang berhubungan dengan Belanja Modal seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta lingkungan hidup. Dengan demikian, meningkatnya DAK akan mengakibatkan peningkatan pada Belanja Modal. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan DAK dalam mencukupi pelayanan publik untuk masyarakat melalui penggunaan Belanja Modal.

Nilai Z-hitung untuk H_4 sejumlah 4,787 serta tingkat signifikansinya yaitu $0,000 < 5\%$ ($\alpha = 0,05$) berarti bahwa H_4 didukung. Dengan demikian, DBH berpengaruh positif pada Belanja Modal. Hal tersebut menerangkan suatu daerah yang memperoleh DBH yang tinggi akan berbanding lurus dengan belanja modalnya. Artinya, jika DBH tinggi maka belanja modal juga tinggi, begitu pula sebaliknya. DBH merupakan salah satu modal dasar pemerintah dalam memperoleh dana pembangunan serta digunakan dalam pemenuhan belanja selain dari DAU dan DAK. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat.

Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dimaksudkan untuk menganalisis variasi variabel dependen dijelaskan oleh hubungannya dengan variasi variabel independen. Hasil koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi setelah ln

R	R Square	Adjusted R Square
0,785	0,617	0,575

Sumber: Data diolah.

Berdasarkan pada tabel diatas $R^2 = 0,617$. Hal ini dapat diartikan bahwa 61,7% variasi dalam Belanja Modal dijelaskan oleh hubungannya dengan variabel independen (PAD, DAU, DAK, serta DBH). Hanya 38,3% dari variabilitas sampel dalam Belanja Modal dijelaskan oleh hubungannya dengan variabel independen yang lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dihasilkan melalui penjelasan teori yang merujuk pada pengembangan hipotesis, pengolahan data dan analisis serta pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan penelitian diatas, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian berikutnya diharapkan memakai periode pengamatan yang lebih terkini dengan rentang waktu yang lebih panjang agar menghasilkan penelitian yang lebih luas, lengkap serta akurat. Selain itu, juga dapat menambah variabel yang bervariasi supaya pengamatan yang lebih representatif dapat diperoleh. Penambahan variabel-variabel independen lain yang kemungkinan dapat menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memprioritaskan dana yang dimiliki daerah untuk Belanja Modal. Hal mana, belanja tersebut sangat berguna dalam peningkatan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang sangat dibutuhkan daerah Papua dan Papua Barat.

Daftar Pustaka

- Abid, M., Rahayu, S., dan Aminah, W. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal studi empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015. *e-Proceeding of Management*, 5(1), 753.
- Algifari. (2000). *Analisis regresi, teori, kasus, dan solusi* (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Algifari. (2016). *Statistika induktif untuk ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Astuti, N. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal: Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

di Provinsi Bengkulu tahun 2010–2014. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Ayem, S., dan Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169-182.

Badrudin, R. (2017). *Ekonomika otonomi daerah* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Bastian, I. (2001). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Bastian, I., dan Soepriyanto, G. (2003). *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Buku 1 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Boedijoewono, N. (2012). *Pengantar statistika ekonomi dan bisnis* (6th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Dewi, F. K. (2017). Pengaruh Alokasi Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Studi kasus pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 STIE YKPN. Yogyakarta.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019, September 25). Diambil kembali dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Fuad, dan Zakaria. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah studi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 143.

Halim, A. (2001). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Halim, A., dan Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. (1999). *Metode penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen* (1st ed.). Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA.
- Juniawan, M. A., dan Suryantini, N. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU DAN DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(3), 1255-1281.
- Kasdy, L. M., Nadirsyah, dan Fahlevi, H. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 12.
- Kusumadewi, H. Y. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2011. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 STIE YKPN. Yogyakarta.
- Levine, D. M., Stephan, D. F., and Szabat, K. A. (2017). *Statistics for managers using microsoft excel*. England: Pearson.
- Machmud, J., dan Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Accounting Science*, 2(1).
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik* (2nd ed.). Yogyakarta: Andi.
- Mubasiroh, L. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal: Studi Kasus Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Nisa, A. A. (2017). Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 203-214.

Nordiawan, D. (2008). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Priambudi, W. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal: Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Putra, A. W. (2017). Determinan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi: Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 STIE YKPN. Yogyakarta.

Rachmawati, L. (2016). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Studi Kasus Pada Pulau Jawa Tahun 2012-2014. *Skripsi*. STIE YKPN. Yogyakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.02/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Roshida, H. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 STIE YKPN. Yogyakarta.
- Santoso, S. (2000). *SPSS mengolah data statistik secara profesional versi 7,5* (3rd ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Shidiq, M. F. (2016). Analisis Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK, dan SiLPA terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Realisasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *Skripsi*. Program Sarjana S-1 STIE YKPN. Yogyakarta.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Subiyakto, H. (2001). *Statistika inferen* (2nd ed.). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
- Suliyanto. (2011). *Eknotrika terapan: teori & aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Vanesha, V. T., Rahmadi, S., dan Parmadi. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2011-2017. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27-36.

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, DAN DBH terhadap pengalokasian Belanja Modal studi empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia Tahun 2012. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 1.

